

# ANALISIS SEKTOR PERIKANAN TERHADAP PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2007 -2011

Jazirotun ni'mah

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Emai : [jazirotunn@gmail.com](mailto:jazirotunn@gmail.com)

## ABSTRAK

Wilayah Kabupaten Tuban mempunyai laut dan pesisir dengan bentangan pantai sepanjang 65 km yang meliputi 5 wilayah kecamatan dari Kecamatan Palang Tuban, Jenu, Tambakboyo dan Bancar. Melihat kondisi alam di Kabupaten Tuban yang terdapat didaerah pesisir laut utara Jawa dengan potensi sumberdaya perikanan yang sangat besar, subsektor perikanan dapat dijadikan sebagai sektor andalan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Tuban. Pengembangan sektor perikanan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan penduduk untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Penelitian bersifat deskriptif dengan metode analisis yang dilakukan yaitu analisis sektor dan subsektor ekonomi potensial untuk menjawab permasalahan pertama serta analisis kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB, ekspor, Pendapatan Daerah dan kemampuan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tuban.

Berdasar pada hasil perhitungan LQ menunjukkan bahwa subsektorperikanan di Kabupaten Tubana adalah salah satu sektor yang menjadi sektor basis. Artinya subsektor perikanan di Kabupaten Tuban mampu memenuhi kebutuhan perikanan lokal baik sebagai bahan konsumsi, maupun sebagai bahan baku industri,bahkan diharapkan dapat mampu mengekspor ke daerah lain. Penyerapan tenaga kerja, kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Tuban pada tahun 2011 dapat memberikan kontribusi lapangan kerja sebesar 2,45 persen dari total angkatan kerja yang bekerja di Kabupaten Tuban. Selama periode 2007-2011 peranan subsektor perikanan Kabupaten Tuban terhadap perekonomian daerah cukup kecil dilihat dari besarnya kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto adalah sebesar 2,02 persen. Ekspor hasil-hasil perikanan di Kabupaten Tuban juga memiliki kontribusi yang cukup kecil terhadap ekspor Kabupaten Tuban. Rata-rata kontribusinya dalam periode 2007-2011 hanya sebesar 1,94 persen. Kontribusi Subsektor Perikanan juga cukup kecil bagi pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Tuban. Pada kurun waktu 2007-2011, kontribusi pendapatan retribusi TPI untuk Pemerintah Kabupaten Tuban rata-rata adalah sebesar 18,44 persen dari total pendapatan bagian bagi hasil pajak/bukan pajak, sehingga kontribusi tersebut belum cukup berarti untuk mendukung keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban.

Kata kunci : Perikanan, Pertumbuhan Ekonomi dan Tuban

## A. PENDAHULUAN

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi yang lebih luas kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing, termasuk mengelola sumberdaya kelautan di wilayahnya. Dalam pasal 3 UU No. 22 tahun 1999 dinyatakan bahwa wilayah daerah provinsi terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Selain itu pada pasal 10 disebutkan bahwa kewenangan daerah kabupaten/kota dalam mengelola laut adalah sejauh sepertiga dari batas laut daerah provinsi, sehingga dengan dasar Undang-undang tersebut, maka masing-masing daerah dapat mengembangkan sumberdaya yang ada seoptimal mungkin. Setelah otonomi daerah, masing-masing daerah sudah lebih bebas dalam menetapkan sektor/ komoditi yang diprioritaskan pengembangannya. Kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor mana yang memiliki keunggulan/kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting. Sektor yang memiliki

keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang (Tarigan, 2005).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan tolak ukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Indikator PDRB berguna untuk menelaah struktur perekonomian, apakah suatu daerah itu merupakan daerah industri, pertanian, atau daerah jasa dengan membandingkan dari waktu ke waktu. Selain itu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang telah dicapai sebelumnya.

Perikanan merupakan subsektor yang masuk dalam sektor pertanian. Karena Indonesia merupakan negara yang mempunyai wilayah laut yang luas, perikanan merupakan subsektor yang penting. Namun di Indonesia subsektor ini belum dikelola dengan baik sehingga hasilnya belum maksimal. Kabupaten Tuban dengan segala potensi yang ada, juga berusaha untuk memacu perekonomian dengan memanfaatkan secara optimal potensi yang telah ada. Dengan karakter baharinya aktivitas ekonomi di Kabupaten Tuban berhubungan dengan kelautan sehingga dapat dikatakan keberadaan laut di Tuban merupakan potensi yang berharga bagi perekonomian Kabupaten Tuban.

Kabupaten Tuban merupakan salah satu sentra perikanan di Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya pembenahan dan mengoptimalkan industri perikanan. Wilayah Kabupaten Tuban mempunyai laut dan pesisir dengan bentangan pantai sepanjang 65 km yang meliputi 5 wilayah kecamatan dari Kecamatan Palang Tuban, Jenu, Tambakboyo dan Bancar. Sesuai arah kebijakannya, penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan ditujukan dalam rangka memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan secara berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi sektor perikanan Kabupaten Tuban, maka dapat dilihat bahwa potensi perikanan Kabupaten Tuban yang besar belum mampu dikelola dengan baik. Selain itu, pengembangan sektor perikanan Kabupaten Tuban belum berfokus pada komoditas yang menjadi unggulan. Melihat hal tersebut perlu diberikan perhatian serius terhadap upaya pengembangan agribisnis komoditas unggulan perikanan Kabupaten Tuban. Sehingga, pembangunan sektor perikanan kedepannya dapat lebih berfokus pada komoditas-komoditas unggulan perikanan yang berdayasaing sehingga dapat meningkatkan pendapatan penduduk untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah subsektor perikanan merupakan sektor basis bagi perekonomian Kabupaten Tuban dibandingkan dengan provinsi Jawa Timur serta kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB, terhadap ekspor, terhadap pendapatan daerah dan kemampuan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tuban.

## **B. MATERI DAN METODE**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tuban dengan pertimbangan karena Kabupaten Tuban diuntungkan dengan posisinya yang berada di lintas jalur migrasi ikan di laut Jawa sehingga potensi ikan melimpah. Selain itu secara geografis wilayah daratan Kabupaten Tuban sangat strategis di wilayah pantai utara Jawa sebagai area pengembangan industri.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data Sekunder yang bersifat Time Series, yaitu diperoleh dari laporan maupun informasi yang diterbitkan oleh suatu Dinas, Badan, maupun Lembaga-Lembaga yang terkait dalam kegiatan penelitian ini yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban serta Dinas lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara Riset Perpustakaan (*library research*), dimana peneliti dapat mencari data yang dibutuhkan melalui sumber-sumber data sekunder yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga pemerintah, seperti pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban, maupun Lembaga-Lembaga lain yang terkait dalam kegiatan penelitian ini. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara bebas, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak instansi yang terkait dalam penelitian ini.

Metode analisis yang dipergunakan adalah analisis sektor dan subsektor ekonomi potensial serta analisis kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB, ekspor, Pendapatan Daerah dan kemampuan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tuban.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Kondisi Ekonomi Kabupaten Tuban

Perkembangan sektor ekonomi dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tuban pada tahun 2007 sampai 2011 terus mengalami peningkatan pada kurun waktu lima tahun terakhir, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1. Peranan Sektor Ekonomi Dalam PDRB Kabupaten Tuban Tahun 2007-2011**

Sektor	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Primer (Agriculture)</b>	<b>42,43</b>	<b>41,67</b>	<b>41,32</b>	<b>40,9</b>	<b>41,36</b>
1. Pertanian	27,92	26,54	25,45	24,65	24,64
2. Pertambangan dan Penggalian	14,51	15,13	15,87	16,25	16,72
<b>Sekunder (Manufacture)</b>	<b>28,88</b>	<b>29,12</b>	<b>29,28</b>	<b>29,13</b>	<b>28,35</b>
3. Industri Pengolahan	25,4	25,6	25,69	25,3	24,34
4. Listrik, Gas & Air Bersih	3,06	3,1	3,17	3,38	3,49
5. Konstruksi	0,42	0,42	0,42	0,45	0,52
<b>Tersier (Services)</b>	<b>28,69</b>	<b>29,21</b>	<b>29,4</b>	<b>29,97</b>	<b>30,29</b>
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	16,55	17,25	17,35	17,9	18,31
7. Pengangkutan & Komunikasi	2,15	2,1	2,09	2,11	2,12
8. Keuangan, Persewaan & Js. Perusahaan	4,79	4,75	4,82	4,95	5,01
9. Jasa-jasa	5,2	5,09	5,13	5	4,87

Sumber : BPS Kabupaten Tuban, 2012

Sektor ekonomi yang paling besar peningkatan peranan dalam pembentukan PDRB adalah sektor pertanian. Sektor ini memberikan sumbangan pada pembentukan PDRB sebesar 24,64 persen. Peringkat berikutnya dalam memberikan sumbangan terhadap perekonomian Kabupaten Tuban adalah sektor industri yaitu sebesar 24,34 persen, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memberikan peranan sebesar 18,31 persen terhadap perekonomian Kabupaten Tuban.

Sektor ekonomi yang mengalami penurunan peran dalam pembentukan PDRB adalah sektor pertanian dari 24,65 persen tahun 2010 menjadi 24,64 persen tahun 2011. Sektor ini dalam perkembangannya mengalami kecenderungan penurunan peranan sektoral dalam pembentukan PDRB. Sektor industri pengolahan dari 25,30 persen tahun 2010 menjadi 24,34 persen tahun 2011, dan sektor jasa-jasa dari 5,00 persen tahun 2010 menjadi 4,87 persen pada tahun 2011. Sektor pertanian dalam perkembangannya mengalami kecenderungan penurunan peranan sektoral dalam pembentukan PDRB. Sektor ekonomi yang paling besar peningkatan peranan dalam pembentukan PDRB adalah sektor pertanian. Sektor ini memberikan sumbangan pada pembentukan PDRB sebesar 24,64 persen. Peringkat berikutnya dalam memberikan sumbangan terhadap perekonomian Kabupaten Tuban adalah sektor industri yaitu sebesar 24,34 persen, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memberikan peranan sebesar 18,31 persen terhadap perekonomian Kabupaten Tuban.

Salah satu indikator ekonomi penting untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan daerah dalam hubungannya dengan kemajuan sektor ekonomi daerah tersebut adalah pendapatan regional yang biasanya dipakai sebagai indikator perkembangan kesejahteraan rakyat. Pada umumnya pendapatan regional disajikan berdasarkan atas dasar harga berlaku, karena pendapatan regional selain dipengaruhi faktor produksi juga dipengaruhi oleh harga barang/jasa. Sehingga gambaran tersebut di atas tidak dapat dijadikan langsung sebagai ukuran peningkatan kinerja ekonomi maupun penyebaran disetiap strata ekonomi, karena pengaruh inflasi sangat dominan baik dalam pembentukan PDRB maupun Pendapatan Regional.

Pendapatan per kapita merupakan sebuah indikator yang sangat dikenal, terutama oleh para birokrat yang berkecimpung dalam penanganan peningkatan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, indikator ini menjadi salah satu yang sangat penting dalam penentuan kebijakan

pembangunan daerah. Pada umumnya, indikator ini disajikan dari angka atas dasar harga berlaku, walaupun sebetulnya masih mengandung perubahan harga barang dan jasa. Selama lima tahun terakhir, pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Tuban mengalami peningkatan. Yang tersaji pada Tabel 2.

**Tabel 2. Perkembangan Pendapatan Per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban Tahun 2007 – 2011**

Tahun	Pandapatan per kapita (Rp)	Pertumbuhan Ekonomi
2007	12.859.333	6,49
2008	13.639.505	6,72
2009	15.288.660	5,99
2010	16.557.391	6,22
2011	18.552.248	7,12

*Sumber : BPS Kabupaten Tuban, 2012*

Dalam periode lima tahun terakhir, pendapatan regional Kabupaten Tuban mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 2007 pendapatan regional atas dasar harga berlaku sebesar Rp 12.519.085,09 juta, dan kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp 20.833.027,93 juta atau meningkat sebesar 66,41 persen. Apabila dilihat perkembangan setiap tahunnya maka pada tahun 2011 terjadi peningkatan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar 12,14 persen sedangkan pada tahun 2011 meningkat sebesar 12,41 persen.

Besaran Pendapatan Regional bila dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun maka akan menghasilkan besaran pendapatan regional per kapita. Pendapatan Regional per Kapita Kabupaten Tuban pada tahun 2007 mencapai Rp 11.634.546 sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp 18.522.248 atau meningkat 59,20 persen. Untuk peningkatan setiap tahunnya tercatat bahwa pada tahun 2010 pendapatan per kapita naik sebesar 8,30 persen dan pada tahun 2011 naik sebesar 11,87 persen.

### **Prasarana Sektor Perikanan**

Sarana dan prasarana subsektor perikanan dimaksudkan untuk meningkatkan produksi perikanan secara optimal dan meningkatkan pendapatan nelayan/petani ikan

Sarana dan prasarana penangkapan di Tuban meliputi tempat pelelangan ikan (TPI) yang berkedudukan di Bancar, Tambakboyo, Jenu dan Palang; LPMHP (Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan) di kecamatan Jenu. Pelabuhan perikanan selain pelabuhan yang terintegrasi dengan pelabuhan samudera juga terdapat pelabuhan khusus perikanan yang dermaganya dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Keberadaan beberapa fasilitas dok/galangan kapalmelengkapi aktivitas subsektor perikanan di Tuban dan sangat mendukung usaha perikanan skala besar maupun perikanan rakyat yang umumnya masih tradisional. Semua ini menjadi pelengkap Tuban sebagai kota pelabuhan dengan sarana perhubungan laut yang memadai.

### **Perkembangan Sub Sektor Perikanan**

Usaha subsektor perikanan meliputi usaha perikanan laut dan usaha perikanan darat. Dari sisi jenis kegiatannya usaha perikanan laut sendiri mencakup perikanan tangkap dan budidaya. Namun begitu kegiatan budidaya perikanan laut sampai saat ini belum memberikan kontribusi yang berarti bagi subsektor perikanan di Kabupaten Tuban. Sebaliknya kegiatan penangkapan ikan laut sangat dominan sebagai konsekuensi dari banyaknya perusahaan penangkapan dan pengelolaan ikan laut.

Seiring dengan adanya otonomi daerah tersebut, maka Kabupaten Tuban sebagai salah satu sentra perikanan di Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya pembenahan dalam mengoptimalkan industri perikanan. Sesuai arah kebijakannya, penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan ditujukan dalam rangka memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan secara berkelanjutan. Sebagai gambaran kondisi industri perikanan di Kabupaten Tuban digambarkan pada Tabel 3 dan 4 dibawah ini:

**Tabel 3. Perkembangan Produksi Perikanan berdasarkan Cabang Usaha di Kabupaten Tuban Tahun 2007 – 2011.**

No	Uraian	Produksi (Ton)				
		2007	2008	2009	2010	2011
<b>1</b>	<b>Penangkapan</b>	<b>10.740,07</b>	<b>10.842,88</b>	<b>10.875,62</b>	<b>10.993,68</b>	<b>11.355,04</b>
	Laut	9.033,92	9.076,61	9.073,27	9.185,80	9.477,21
	Perairan Umum	1.706,15	1.766,27	1.802,35	1.807,88	1.877,83
<b>2</b>	<b>Budidaya</b>	<b>6.139,83</b>	<b>7.063,16</b>	<b>7.785,32</b>	<b>8.956,28</b>	<b>10.068,44</b>
	Tambak	1.956,26	2.249,71	2.433,89	2.763,80	3.381,46
	Sawah Tambak	4.048,59	4.655,88	5.172,16	5.945,54	6.039,95
	Kolam	124,78	137,26	156,88	217,14	569,30
	Karamba Jaring Apung	10,20	20,31	22,39	29,80	77,73
	<b>Jumlah</b>	<b>16.879,90</b>	<b>17.906,04</b>	<b>18.660,94</b>	<b>19.949,96</b>	<b>21.423,48</b>

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan, 2012

**Tabel 4. Perkembangan Nilai Produksi Perikanan berdasarkan Cabang Usaha di Kabupaten Tuban Tahun 2007 – 2011**

No	Uraian	Nilai Produksi (Juta Rupiah)				
		2007	2008	2009	2010	2011
<b>1</b>	<b>Penangkapan</b>	<b>41.130,20</b>	<b>41.728,73</b>	<b>45.570,22</b>	<b>66.910,20</b>	<b>88.944,01</b>
	Laut	36.046,01	36.119,97	38.812,34	57.874,46	75.393,52
	Perairan Umum	5.084,19	5.608,76	6.757,87	9.035,74	13.550,49
<b>2</b>	<b>Budidaya</b>	<b>68.966,09</b>	<b>82.409,09</b>	<b>101.223,88</b>	<b>134.339,14</b>	<b>161.454,97</b>
	Tambak	47.464,18	56.275,96	62.724,49	80.403,41	93.479,42
	Sawah Tambak	20.828,11	25.266,15	37.361,34	51.909,99	58.227,18
	Kolam	612,58	738,98	983,87	1.770,71	8.729,28
	Karamba Jaring Apung	61,22	128,00	154,18	255,03	1.019,09
	<b>Jumlah</b>	<b>110.096,29</b>	<b>124.137,82</b>	<b>146.794,09</b>	<b>201.249,34</b>	<b>250.136,73</b>

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan

Dari Tabel diatas, terlihat bahwa kondisi perikanan di kabupaten Tuban dari tahun 2007 sampai 2011. Produksi perikanan dan kelautan Kabupaten Tuban pada akhir tahun 2011 tercatat sebesar 21.423,48 ton yang terdiri atas cabang usaha penangkapan sebesar 11.355,04 ton dan cabang usaha budidaya sebesar 10.068,44 ton. Secara umum rata-rata peningkatan produksi perikanan pada periode waktu tahun 2007 – 2011 adalah sebesar 5,02%. Nilai produksi perikanan pada akhir tahun 2011 tercatat sebesar Rp. 250.136.730.000,00 yang terdiri atas cabang usaha penangkapan sebesar Rp. 88.940.010.000,00 dan cabang usaha budidaya sebesar Rp. 161.545.970.000,00. Rata-rata tingkat peningkatan nilai produksi perikanan tercatat sebesar 22,31%. Peningkatan tersebut disamping dipengaruhi oleh peningkatan produksi juga disebabkan perbaikan nilai jual komoditas serta jenis ikan yang menjadi hasil tangkapan merupakan ikan dengan nilai ekonomis tinggi.

Otonomi daerah (Otod) merupakan paradigma baru didalam pengelolaan pemerintahan, karena mempengaruhi secara langsung bentuk-bentuk pengelolaan dan pemanfaatan berbagai sumber daya termasuk kelautan, yaitu dengan menggeser kewenangan pengelolaan wilayah laut dari pemerintah pusat ke daerah. Pergeseran ini diharapkan dapat membawa berbagai keuntungan

dalam pembangunan kelautan yang efisien, adil dan berkelanjutan. Dengan adanya pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan pada batas-batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka sangat diharapkan bahwa manfaat sumber daya kelautan itu harus dapat dirasakan oleh masyarakat setempat (Dahuri, 2006).

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban pada akhir tahun 2011 berhasil merealisasikan pendapatan asli daerah sebesar Rp.167.753.200,00 yang terdiri atas Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebesar Rp. 68.566.700,00 (40,87%), Retribusi Ijin Usaha Perikanan dan Kelautan sebesar Rp. 68.751.500,00 (40,98%), Pendapatan Balai Benih Ikan sebesar Rp. 15.000.000,00 (8,94%) dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 15.435.000,00 (9,20%). Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan sumber Pendapatan Tahun 2007 – 2011 disajikan pada tabel 5 berikut ini:

**Tabel 5. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan sumber Pendapatan Tahun 2007 – 2011**

No	Sumber Pendapatan					
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	52.298.350	52.125.000	52.182.900	57.060.000	68.566.700
2	Retribusi Ijin Usaha Perikanan dan Kelautan (IUPK)	55.035.000	55.904.000	61.139.000	64.584.000	68.751.500
3	Pendapatan Balai Benih Ikan (BBI)	6.650.000	6.710.000	9.261.000	13.200.000	15.000.000
4	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	9.488.500	15.435.000
	<b>Jumlah</b>	113.983.350	114.739.000	122.582.900	144.332.500	167.753.200

Sumber : BPS Kabupaten Tuban, 2012.

#### **Sektor Basis Di Kabupaten Tuban**

Guna menentukan apakah suatu sektor tergolong basis, salah satu metode yang digunakan yakni metode Location Quotient (LQ). Metode LQ menggambarkan tingkat kemampuan sektor tersebut untuk menyumbang terhadap kebutuhan ekonomi regional. Dengan kata lain LQ diperoleh dari perbandingan *share* suatu sektor di Kabupaten Tuban terhadap *share* sektor tersebut terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur.

Jika perbandingan menunjukkan angka satu atau lebih berarti sektor tersebut mampu memenuhi kebutuhan akan sektor itu sendiri. Berarti *share* tersebut di Kabupaten Tuban lebih berarti dibandingkan dengan *share* sektor tersebut dari daerah lain. Dari tabel 6 ditunjukkan bahwa sektor yang menjadi sektor basis di Kabupaten Tuban selama periode 2007 - 2011 adalah sektor dengan nilai  $LQ > 1$  yakni sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, serta Listrik, Gas dan Air Minum

**Tabel 6. LQ Sektor-sektor Ekonomi Kabupaten Tuban Terhadap Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011**

Sektor	2007	2008	2009	2010	2011
Pertanian	1,69	1,62	1,62	1,60	1,60
Pertambangan dan Penggalian	6,53	6,80	7,26	7,26	8,05
Industri	0,89	0,09	0,93	0,93	0,90
Listrik, Gas dan Air Minum	1,94	2,01	2,10	2,31	2,58
Bangunan	0,11	0,10	0,09	0,10	0,11
Perdagangan, Restoran dan Hotel	0,58	0,61	0,59	0,60	0,60
Angkutan dan Komunikasi	0,41	0,38	0,38	0,37	0,37
Bank, Lemkeu dan Jasa Perusahaan	1,00	0,98	0,98	1,00	0,99
Jasa-Jasa	0,59	0,57	0,59	0,58	0,58

Sumber : BPS Kabupaten Tuban, 2012.

Analisis perhitungan *Location Quotient* (LQ) bahwa sektor perikanan di Kabupaten Tuban memiliki nilai LQ selalu lebih besar dari satu. Nilai LQ yang selalu lebih besar dari satu mengindikasikan bahwa sektor perikanan dapat menjadi kekuatan dalam pembangunan daerah dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah. Data Nilai LQ sektor perikanan Kabupaten Tuban pada tahun analisis tahun 2007 sampai tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 7

Dari perhitungan nilai LQ per subsektor pada sektor pertanian menunjukkan pola nilai LQ seperti terlihat pada Tabel 7. Hasil perhitungan, subsektor perikanan menunjukkan nilai LQ lebih dari 1 dan nilainya terendah kedua setelah subsektor tanaman perkebunan dibandingkan subsektor- subsektor lainnya pada sektor pertanian. Dengan demikian walaupun dengan nilai yang rendah tetapi maka dapat dikatakan bahwa subsektor perikanan merupakan subsektor basis selama periode 2007-2011 yang berarti sudah mampu mencukupi bagi kebutuhan perekonomian Kabupaten Tuban, bahkan sudah dapat digunakan sebagai salah satu produk yang dapat diekspor ke luar Kabupaten Tuban dimana nilai LQ dalam periode penelitian tersebut selalu bernilai >1.

**Tabel 7. LQ Sektor-sektor Pertanian Kabupaten Tuban Terhadap Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011**

Sektor	2007	2008	2009	2010	2011
<b>Pertanian</b>	<b>1,69</b>	<b>1,62</b>	<b>1,62</b>	<b>1,60</b>	<b>1,60</b>
• Tanaman Bahan Pangan	2,23	2,14	2,12	2,13	2,10
• Tanaman Perkebunan	0,72	0,69	0,70	0,69	0,70
• Peternakan	1,18	1,15	1,15	1,15	1,20
• Kehutanan	2,52	2,50	2,18	1,82	1,90
• Perikanan	1,03	1,09	1,06	1,05	1,07

Sumber : BPS Kabupaten Tuban, 2012.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Tuban memiliki potensi besar dalam sektor perikananannya. Namun, tidak semua komoditas pertanian yang ada di Kabupaten Tuban memberikan kontribusi besar dalam pengembangan sektor pertanian. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai apakah komoditas perikanan dapat menjadi unggulan daerah. Sehingga, pembangunan sektor pertanian khususnya sub sektor perikanan kedepannya dapat lebih berfokus pada komoditas-komoditas unggulan perikanan yang berdayasaing.

Daya saing adalah suatu keunggulan komparatif dari kemampuan dan pencapaian suatu perusahaan, subsektor atau wilayah untuk memproduksi, menjual, dan menyediakan barang-barang dan jasa kepada pasar. Daya saing merupakan kemampuan suatu produsen untuk memproduksi suatu barang atau jasa dengan biaya yang cukup rendah sehingga pada harga-harga yang terjadi di pasar internasional kegiatan produksi tersebut menguntungkan (Saptana, 2010).

Sebenarnya, kajian daya saing dapat diterapkan pada suatu komoditas, sektor atau bidang, wilayah dan negara (Feryanto, 2010).

Penentuan atau identifikasi alternatif komoditas unggulan daerah menjadi penting karena komoditas unggulan diharapkan dapat menjadi komoditas penggerak utama (*prime mover*) perekonomian daerah. Pembangunan ekonomi daerah akan lebih optimal apabila didasarkan pada keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Pengertian unggul disini didasarkan dalam bentuk perbandingan dengan wilayah yang lebih tinggi. Keunggulan komparatif suatu komoditas adalah jika produktifitas yang dimiliki lebih unggul secara relatif dibandingkan komoditas sejenis di wilayah yang lebih tinggi. Sedangkan, keunggulan kompetitif merupakan kemampuan suatu komoditas menembus pasar yang diapresiasi dengan penerimaan yang lebih tinggi. Penentuan komoditas unggulan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ). Analisis LQ dapat mengukur tingkat konsentrasi suatu komoditas bila dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas. Nilai LQ yang dihasilkan hanya mencerminkan sisi keberlimpahan potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan terhadap komoditas tersebut secara relatif. Sedangkan, sisi permintaan dalam bentuk apresiasi konsumen terhadap komoditas belum terlihat. Komoditas yang ditentukan dari analisis LQ bisa saja tidak memiliki keunggulan kompetitif yang disebabkan oleh karakteristik komoditas tersebut (Bachrein, 2003).

Selama periode tahun 2007-2011, sektor perikanan memiliki nilai  $LQ > 1$ . Berdasarkan penelitian, sektor ini dapat ditingkatkan ke kegiatan ekspor karena memiliki pasar pada skala lokal dan di luar batas-batas wilayah kabupaten Tuban. Berbeda dengan sektor lain dimana sektor basis merupakan sektor yang dapat mengekspor barang atau jasa ke luar wilayahnya, maka sektor pertanian dimana termasuk di dalamnya sektor perikanan dapat memenuhi kebutuhan pasar di luar wilayah dengan cara menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Tuban karena pertumbuhan ekonomi kabupaten Tuban yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita penduduknya, khususnya sub sektor perikanan.

Identifikasi alternatif komoditas unggulan perikanan di Kabupaten Tuban menjadi sangat penting karena komoditas unggulan yang terpilih nantinya diharapkan mampu menjadi komoditas penggerak utama perekonomian daerah di Kabupaten Tuban baik yang diperdagangkan secara komoditas segar maupun dalam bentuk berbagai produk olahannya. Salah satu cara dalam upaya menentukan komoditas unggulan adalah dengan mengkaji keunggulan komparatif dari suatu daerah. Keunggulan komparatif disini diartikan sebagai kemampuan suatu daerah untuk memproduksi komoditas atau produk yang secara relatif lebih unggul dibandingkan daerah lainnya atau dapat dikatakan terdapat keberlimpahan sumberdaya yang dimiliki suatu daerah tersebut sehingga mampu mendistribusikan sumberdaya tersebut ke wilayah lainnya (Widodo, 2006).

Berdasarkan hasil perhitungan nilai LQ dengan membandingkan dengan sektor pertanian lainnya memiliki nilai LQ lebih besar dari satu ( $LQ > 1$ ). Nilai LQ lebih besar dari satu mengindikasikan bahwa komoditas-komoditas perikanan tangkap tersebut terkonsentrasi secara relatif pengusaannya di Kabupaten Tuban. Semakin besar nilai LQ yang dihasilkan menunjukkan semakin terkonsentrasinya perusahaan komoditas-komoditas tersebut di Kabupaten Tuban. Derajat konsentrasi atau sifat basis inilah yang mengindikasikan bahwa komoditas tersebut berpotensi untuk menjadi komoditas unggulan.

Meskipun sektor perikanan merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan dan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kabupaten Tuban, akan tetapi kita tidak boleh melupakan sektor nonbasis lainnya. Karena dengan adanya sektor tersebut maka sektor nonbasis dapat dibantu untuk dikembangkan menjadi sektor basis baru.

### **Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perikanan**

Dalam menganalisis dan mengetahui pertumbuhan penyerapan tenaga kerja subsektor perikanan di Kabupaten Tuban, digunakanlah metode *Shift Share* untuk menganalisis perkembangan subsektor industri ini dengan memakai dua titik waktu yaitu tahun 2007 sampai tahun 2011. Hasil perhitungan analisis *shift share* disajikan pada Tabel 8 dan 9 dibawah ini.

### **Rasio Indikator Kegiatan Ekonomi**

Indikator kegiatan ekonomi pada penelitian ini yaitu penyerapan tenaga kerja dari subsektor sub sektor perikanan di Kabupaten Tuban. Rasio kegiatan ekonomi terbagi dalam tiga bentuk nilai, yaitu  $R_a$ ,  $R_i$  dan  $r_i$ . Semakin tinggi nilai rasio yang didapat menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan yang terjadi pada sektor perikanan di Kabupaten Tuban. Ketiga nilai tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor perikanan di Kabupaten

Tuban yang dibandingkan pada dua titik waktu, yaitu tahun awal pada tahun 2007 dan tahun akhir 2011.

**Tabel 8. Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perikanan di Kabupaten Tuban tahun 2007 – 2011**

Jenis Usaha	Rasio Indikator Kegiatan Ekonomi		
	Ra	Ri	ri
Perikanan	0,15	0,22	0,17

Sumber : BPS Kabupaten Tuban, 2012.

Nilai Ra diperoleh dari selisih antara jumlah tenaga kerja yang diserap sektor perikanan di Kabupaten Tuban tahun 2011 dengan jumlah tenaga kerja yang diserap sektor perikanan di Kabupaten Tuban tahun 2007 dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang diserap sektor perikanan di Kabupaten Tuban tahun 2007. Pada Tabel 13 nilai Ra adalah sebesar 0,15. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor perikanan di Kabupaten Tuban meningkat 15 persen dari tahun 2007 sampai tahun 2011.

Nilai Ri diperoleh dari hasil perhitungan selisih antara jumlah tenaga kerja yang diserap sektor perikanan di Kabupaten Tuban tahun 2011 dengan jumlah tenaga kerja yang diserap sektor perikanan di Kabupaten Tuban tahun 2007 dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang diserap sektor perikanan di Kabupaten Tuban tahun 2007.

Sektor perikanan di Kabupaten Tuban memiliki nilai Ri yang positif yaitu sebesar 0,22. Hal ini mengindikasikan sektor perikanan di Kabupaten Tuban mengalami pertumbuhan 22 persen dalam kurun waktu 5 tahun di Kabupaten Tuban. Dengan pertumbuhan 22 persen ini, memperlihatkan bahwa hampir seperlima dari jumlah keseluruhan tenaga kerja yang diserap pada sektor pertanian khususnya perikanan.

Nilai ri didapat dari perhitungan selisih antara jumlah tenaga kerja yang diserap IKM sektor perikanan di Kabupaten Tuban tahun 2011 dengan jumlah tenaga kerja yang diserap sektor perikanan di Kabupaten Tuban tahun 2007 dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang diserap sektor perikanan di Kabupaten Tuban tahun 2007. Nilai ri yang diperoleh adalah 0,17 yang artinya telah terjadi pertumbuhan penyerapan tenaga kerja oleh sektor perikanan di Kabupaten Tuban sebesar 17 persen dalam kurun waktu 5 tahun (2007-2011). Artinya, dari jumlah keseluruhan tenaga kerja di pertanian, sektor perikanan berkontribusi sebesar 17 persen dalam penyerapan tenaga kerja.

#### Analisis Komponen Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja

**Tabel 9. Proporsi Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perikanan di kabupaten Tuban**

Jenis Usaha	PR		PP		PPW	
	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
Perikanan	695	12,17	185	6,71	-118	-4,26

Sumber : BPS Kabupaten Tuban, 2012.

Komponen Pertumbuhan Regional (PR) merupakan hasil kali antara rasio jumlah tenaga kerja yang diserap sektor perikanan Provinsi Kabupaten Tuban (Ra) dengan jumlah tenaga kerja yang diserap sektor perikanan Provinsi Kabupaten Tuban pada tahun 2007. Sektor perikanan mempunyai nilai Pertumbuhan Regional (PR) sebesar 695 jiwa dengan kontribusi 12,17 persen. Komponen ini dapat terjadi karena adanya perubahan kebijakan ekonomi oleh pemerintah daerah. Selain itu, dapat pula disebabkan oleh adanya perubahan dalam hal-hal yang mempengaruhi perekonomian semua sektor di Kabupaten Tuban.

Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP) didapat dari hasil kali antara rasio jumlah tenaga kerja yang diserap sektor perikanan Kabupaten Tuban pada tahun 2007 dengan selisih antara Ri dan Ra. Sektor perikanan mempunyai nilai Pertumbuhan Proporsional (PP) sebesar 185 jiwa dengan kontribusi sebanyak 6,71 persen. Nilai PP yang lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa sektor perikanan di Kabupaten Tuban mengalami pertumbuhan yang cepat.

Untuk komponen pertumbuhan pangsa wilayah, sektor yang memiliki nilai PPW<sub>ij</sub> > 0 berarti sektor tersebut memiliki daya saing yang baik dibanding dengan subsektor-subsektor pertanian yang lain di kota atau kabupaten yang lain di Provinsi Jawa Timur, sedangkan untuk

sektor yang memiliki PPWij < 0 maka sektor tersebut tidak dapat bersaing dengan baik apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya. Tabel 14 menunjukkan bahwa sektor perikanan memiliki nilai PPW < 0 yaitu sebesar -4,26 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam penyerapan tenaga kerja, sektor perikanan di Kabupaten Tuban belum mampu bersaing dengan subsektor perikanan yang lain di kota atau kabupaten lain di Jawa Timur.

Dengan demikian, kegiatan sektor perikanan menunjukkan kontribusi yang cukup baik terhadap penyerapan tenaga kerja untuk bidang pertanian di Kabupaten Tuban, namun memiliki daya saing yang kurang baik untuk sektor tersebut di wilayah lainnya karena nilai PPW yang negatif. Hal ini disebabkan karena semakin bertambah banyaknya jumlah unit usaha sektor perikanan di Kabupaten Tuban

Hal ini sebagai respon atas semakin banyaknya peminat produk perikanan baik di dalam wilayah Kabupaten Tuban maupun yang di luar wilayah Kabupaten Tuban sehingga membuka kesempatan kerja dan berusaha yang lebih banyak lagi bagi masyarakat. Selain itu, memberikan peluang bagi pengusaha untuk menginvestasikan dananya pada sektor ini.

Pertumbuhan Bersih (PB) penyerapan tenaga kerja diperoleh dari penjumlahan komponen penyerapan tenaga kerja Pertumbuhan Proporsional (PP) dan komponen penyerapan tenaga kerja Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) sektor perikanan. Pada Tabel 10 dapat dilihat bahwa perkembangan penyerapan tenaga kerja sektor perikanan pada tahun 2007-2011 bernilai PB > 0 yang artinya pertumbuhan sektor perikanan dapat dikatakan termasuk ke dalam kelompok progresif atau maju.

**Tabel 10. Pertumbuhan Bersih (PB) Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perikanan di Kabupaten Tuban Tahun 2007-2011**

Jenis Usaha	PB	
	Jiwa	%
Perikanan	67	2,45

Sumber : BPS Kabupaten Tuban, 2012.

#### **Kontribusi Subsektor Perikanan Terhadap Peningkatan PDRB Kabupaten Tuban**

Untuk melihat peranan subsektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Tuban, maka digunakan indikator nilai PDRB Kabupaten Tuban menurut subsektor. Seperti yang terlihat pada Tabel 11, PDRB subsektor perikanan Kabupaten Tuban. Tahun 2011 mencapai Rp. 406.365,04 milyar. Angka ini berarti memberikan kontribusi sebesar 7,67 persen terhadap total PDRB Sektor Pertanian dan 1,90 persen terhadap total PDRB Kabupaten Tuban pada tahun tersebut.

**Tabel 11. Kontribusi Nilai Tambah Bruto Subsektor perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Tuban atas Dasar Harga Berlaku, 2007-2011**

Tahun	Nilai Tambah Bruto Subsektor perikanan (Rp)	PDRB (Rp)	Kontribusi (%)
2007	280.701,21	12.859.333,07	2,18
2008	320.894,11	15.110.533,77	2,12
2009	345.897,33	16.977.899,88	2,04
2010	354.903,94	19.040.920,10	1,86
2011	406.365,04	21.430.704,96	1,90
Rataan	341.752,33	17.083.878,36	2,02

Sumber : BPS Kabupaten Tuban, 2012.

Dari perhitungan menunjukkan bahwa selama periode tersebut rata-rata kontribusi subsektor perikanan adalah sebesar 2,012 persen, kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 2,18 persen, dan terendah pada tahun 2010 yaitu sebesar 1,86 persen. Sumbangan subsektor perikanan walaupun kecil tetapi hal tersebut mempunyai arti bagi perekonomian daerah karena dapat mempengaruhi besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tuban, selain itu perikanan merupakan komoditas yang dapat menggerakkan sektor industri

pengolahan, perdagangan dan pengangkutan karena merupakan bahan *input* bagi sektor-sektor tersebut.

### Kontribusi terhadap Ekspor

Analisis kontribusi perikanan laut terhadap ekspor dihitung dengan membandingkan nilai ekspor ikan Kabupaten Tuban dengan nilai total ekspor Kabupaten Tuban, adapun hasil perhitungan dan perkembangan kontribusi subsektor perikanan terhadap ekspor Kabupaten Tuban selama periode 2000-2007 dapat dilihat pada tabel 12.

**Tabel 12. Kontribusi Subsektor Perikanan Terhadap Ekspor Kabupaten Tuban, 2007-2011**

Tahun	Nilai Ekspor Sektor Perikanan (USD)	Nilai Ekspor Total (USD)	Kontribusi (%)
2007	118.834,85	4.497.445,72	2,16
2008	127.485,00	5.519.115,00	2,31
2009	128.925,83	7.948.425,64	1,62
2010	139.922,50	7.439.482,98	1,88
2012	161.687,36	9.407.011,69	1,72
Rataan	135.371,11	6.962.296,21	1,94

Sumber : BPS Kabupaten Tuban, 2012.

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa selama periode tersebut rata-rata kontribusinya adalah sebesar 4,07 persen, hal ini menunjukkan bahwa subsektor perikanan cukup kecil peranannya terhadap perekonomian daerah di Kabupaten Tuban. Pada periode pengamatan tahun 2007-2011 kontribusi subsektor perikanan terhadap ekspor Kabupaten Tuban sangat fluktuatif hal ini dikarenakan perikanan bukan merupakan sektor utama mendukung ekspor di Kabupaten Tuban dimana ekspor utamanya berupa usaha industri pertambangan dan penggalian.

Fluktuatif kontribusi sektor perikanan tersebut disebabkan oleh kelangkaan BBM, sehingga banyak nelayan kecil yang tidak mampu untuk pergi melaut, dan masih tradisionalnya teknologi para nelayan, sehingga mengakibatkan banyak nelayan kecilyang merugi karena hasil produksinya tidak mampu menutupi biaya produksi. Akhirnya produksi ikan yang hanya dijual di dalam negeri sebagai dampak meningkatnya permintaan, serta pengaruh harga barang untuk proses ekspor yang meningkat maupun standar yang ditetapkan oleh pihak luar negeri yang makin ketat.

### Kontribusi Terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan dari sub sektor perikanan untuk Pemerintah Kabupaten Tuban selama periode tersebut rata-rata adalah sebesar 0,202 persen dari total pendapatan bagian bagi hasil pajak/bukan pajak (Tabel 13), sehingga kontribusi tersebut sangat kecil untuk mendukung keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban.

**Tabel 18. Kontribusi Subsektor Perikanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban tahun 2007-2011**

Tahun	Bagian Retribusi TPI untuk Pemerintah Kabupaten Tuban (Rp)	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (Rp)	Kontribusi (%)
2007	113.983.350,00	59.562.725.569,77	0,19
2008	114.739.000,00	58.095.787.850,03	0,20
2009	122.582.900,00	59.576.347.658,00	0,21
2010	144.332.500,00	72.601.961.103,00	0,20
2011	167.753.200,00	79.107.885.911,80	0,22
Rataan	132.678.190,00	65.788.941.618,52	0,202

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban, 2012

Kontribusi sektor perikanan terhadap PAD Kabupaten Tuban sangat kecil yaitu 0,202 % dari total pendapatan daerah. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 0,22 persen sebesar Rp. 167.753.200,00. Perbedaan ini disebabkan masih dianggapnya sub sektor perikanan dengan sebelah mata oleh pemerintah daerah dimana Pemerintah Tuban masih mengandalkan sektor pertambangan dan industri.

#### D. KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasar pada hasil perhitungan LQ yang menunjukkan bahwa subsektor perikanan adalah salah satu sektor yang menjadi sektor basis. Artinya subsektor perikanan di Kabupaten Tuban mampu memenuhi kebutuhan perikanan lokal baik sebagai bahan konsumsi, maupun sebagai bahan baku industri, bahkan diharapkan dapat mampu mengekspor ke daerah lain.
2. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Tuban pada tahun 2011 dapat memberikan kontribusi lapangan kerja sebesar 2,45 persen dari total angkatan kerja yang bekerja di Kabupaten Tuban. Sehingga dengan adanya kegiatan usaha subsektor perikanan dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Tuban.
3. Selama periode 2007-2011 peranan subsektor perikanan Kabupaten Tuban terhadap perekonomian daerah cukup kecil dilihat dari besarnya kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto adalah sebesar 2,02 persen.
4. Ekspor hasil-hasil perikanan di Kabupaten Tuban juga memiliki kontribusi yang cukup kecil terhadap ekspor Kabupaten Tuban. Rata-rata kontribusinya dalam periode 2007-2011 hanya sebesar 1,94 persen, hal ini menunjukkan bahwa subsektor perikanan cukup kecil perannya terhadap perekonomian daerah di Kabupaten Tuban.
5. Kontribusi Subsektor Perikanan juga cukup kecil bagi pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Tuban. Pada kurun waktu 2007-2011, kontribusi pendapatan retribusi TPI untuk Pemerintah Kabupaten Tuban rata-rata adalah sebesar 18,44 persen dari total pendapatan bagian bagi hasil pajak/bukan pajak, sehingga kontribusi tersebut belum cukup berarti untuk mendukung keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban.

##### Saran

Dari pembahasan yang telah dilakukan serta dikaitkan dengan kesimpulan yang didapat, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membantu dalam membuat kebijakan sehubungan dengan hal tersebut, antaralain :

1. Melihat begitu besarnya potensi subsektor perikanan di Kabupaten Tuban, maka menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan subsektor perikanan, yakni dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan berbagai kemudahan bagi para pengusaha perikanan serta membantu dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi seperti masalah perijinan
2. Sebagai sektor basis, maka subsektor perikanan tentunya mempunyai *multiplier effect* terhadap terhadap sektor-sektor lainnya yang terkait dengan usaha perikanan, seperti sektor industri pengolahan, angkutan, perdagangan, dan jasa-jasa. Karena itu diharapkan agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diarahkan untuk menciptakan sinergi yang baik antara subsektor perikanan dan sektor-sektor terkait lainnya.
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang kelautan dan perikanan perlu dilakukan dengan memperbanyak lembaga pendidikan atau mengadakan latihan kerja khusus di bidang kelautan atau perikanan sehingga dapat terjangkau oleh nelayan kecil dan masyarakat secara luas.
4. Ikan laut termasuk sumberdaya alam yang dapat diperbaharui tetapi juga berpotensi habis bila terjadi eksploitasi tanpa batas. Dalam rangka membatasi terjadinya eksploitasi tanpa batas, perlu adanya pengaturan atau pengendalian melalui pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anapaku, A. 2002 *Identifikasi Unggulan Sub Sektor Pertanian dan Produktifitas Tanaman Pangan di Kabupaten Sumba Timur*. Tesis. Magister Manajemen. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Anwar, E. 2005. *Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, Tinjauan Kritis*. P4Wpress. Bogor.
- Bachrein S. 2003. *Penetapan Komoditas Unggulan Propinsi. Working Paper*.Bogor: Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Hlm 1- 17.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban. 2007 – 2012. *Pendapatan Regional Kabupaten Tuban*, beberapa tahun, Tuban.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban. 2007 – 2012. *Tinjauan Ekonomi Kabupaten Tuban*, beberapa tahun, Tuban.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban. 2007 – 2012. *Tuban Dalam Angka*,beberapa tahun, BPS, Tuban.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur. 2007– 2012. *Pendapatan Regional Propinsi Sulawesi Utara*. BPS, Surabaya
- Badan Pusat Statistik. 2012. *KBLI 2011 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia*. BPS, Jakarta
- Damanhuri.D. S. 2000, “*Dimensi Ekonomi Politik Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia (JEBI)* Volume 15, No 1, 41-45.
- Glasson, J. 1977. *Pengantar Perencanaan Regional*. Terjemahan oleh Paul Sitohang. Program Perencanaan Nasional FEUI-Bapennas. Lembaga Penerbitan FEUI. Jakarta.
- Latuconsina, Asmaria, Jacob, FR, Syantu, Simon. P, dan Telanusa, Fahrudin. 1992, ”*Efisiensi Ekonomi Pengelolaan Perikanan Tradisional di Maluku*”. *Agro Ekonomi* nomor 2 Tahun XXII, 83-92.
- Marquez, M A, Julian Ramajo dan Geoffrey J D Hewwings. 2009. *Incorporating Sectoral Structure into Shift–Share Analysis*. *Growth and Change Journal* Volume 40 Nomor 4.
- Mayor, M dan Ana Jesus Lopez. 2008. *Spatial shift-share analysis versus spatial filtering: an application to Spanish employment data*. *Empical Economics Journal* Volume 34.
- Mukhyi, M A. 2007. *Analisis Peranan Subsektor Pertanian dan Sektor Unggulan Terhadap Pembangunan Kawasan Ekonomi Propinsi Jawa Barat: Pendekatan Analisis IRIO*. [mukhyi.staff.gunadarma.ac.id](mailto:mukhyi.staff.gunadarma.ac.id)
- Saerofi, M. 2005. “*Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Sektor Potensial di Kabupaten Semarang (Pendekatan Model Basis Ekonomi dan SWOT)*” Skripsi. Jurusan Ekonomi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Semarang.